

NAMA UNIT ORGANISASI	:	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TUGAS	:	Melaksanakan urusan Pemerintahan/Kewenangan Provinsi, di bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, Kawasan Permukiman, dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum serta tugas pembantuan.
FUNGSI		 A. Perumusan kebijakan teknis dibidang sekretariat, Rumah Umum, Rumah Swadaya, Kawasan Permukiman, dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum; B. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, Kawasan Permukiman, dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum; C. Pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; D. Pemberi dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya, Kawasan Permukiman, dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum; E. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; F. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; G. Pelaksanaan pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal; H. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;



REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2013	TARGET TAHUNAN						
				2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman	Pembangunan Prasarana, Sarana Umum Perumahan (unit)	-	-	-	-	3.000	3.250	6.250	Dokumen Renja Dokumen Rensta
		Luas kawasan kumuh (ha)	1.792	1.592	1.392	1.192	1.292	1.092	1.092	Dokumen RPJMD A. Data hasi pembangunan kawasan kumuh, PSU Perumahan dan Rehab
2	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Rehabilitasi rumah tidak layak huni (unit)	2.900	600	1.500	1.500	427	600	7.527	RTLH yang Dilksanakan Dinas PKP Provsu

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUMMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. IDA MARIANA, M.Si PEMBINA TINGKAT I NIP. 19601125 199203 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Williem Iskandar No. 9 Telepon : (061) 6619431 – 6623480 M E D A N - 20222

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor: 1061.1/262 PKP-PROVSU/2017
TENTANG

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 - 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 03 dan Pasal 04 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah.
- bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2018

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor: 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1103);
- 2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang—Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor: 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4124);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Instruksi Presiden Nomor: 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor: 12);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 08 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 Nomor: 19);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 06 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

18. Peraturan Gubernur Nomor : 38 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 – 2018

PERTAMA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017 -2018 kepada Gubernur Sumatera Utara.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pekerjaan berakhir, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal: 95 Dutember 2017

PROVINSI SUMATERA UTARA

NDA MARTANA, M.Si,

NIP. 19601125 199203 2 001

Tembusan Yth:

- Bapak Gubernur Sumatera Utara d/p. Biro Organisasi Setdaprovsu.;
- 2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
- 3. Pertinggal.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 061.1/2666-PLP PROV. 81/2017 TANGGAL: 05-12-2017.

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PENETAPAN REVISI **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)** SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN **PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 - 2018**

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4	5
1	Ir. IDA MARIANA, M.Si	IV/b	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Pengarah
2	Ir. SUHERMAN	IV/b	Sekretaris	Penanggung Jawab
3	SALMARIANTO, ST	III/c	Kasubbag Program	Ketua
	MHD. ALI RAMBE, ST	II/b	Staf	Wakil Ketua
4	LEBAR, ST	III/d	Kabid Rumah Umum dan Komersil	Anggota
5	Dra. BESLIDA SAHMAWATI, M.Si	IV/a	Kabid Rumah Swadaya	Anggota
6	H. HERMANSYAH, SH	IV/b	Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
7	Ir. IDA MARIANA, M.Si	IV/b	Kabid Perumahan dan Permukiman	Anggota
8	SYAIFUL ZUHRI, ST	111/c	Kasi Pendataan dan Perencanaan	Anggota
9	MUSTIKA KALBU, ST	III/c	Kasi Penyediaan dan Pembiayaan	Anggota
10	BONA SIMON TUA SINAGA, ST	III/b	Kasi Monitoring dan Evaluasi	Anggota
11	AMIR HAMZAH RITONGA, S.Sos	III/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
12	HADASA MANURUNG, ST	III/d	Kasi Pendataan dan Perencanaan	Anggota
13	NURDANILA NASUTION, ST	III/c	Kasi Pemberdayaan dan pelaksanaan	Anggota
14	CHANDRA, ST, MT	III/c	Kasi Monitoring dan Evaluasi	Anggota
15	MHD. YUSUF, SE	III/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
16	PANATAR PAKPAHAN, ST	III/b	Kasi Pendataan dan Perencanaan	Anggota
17	NURBAYA SURBAKTI, ST, MT	III/c	Kasi Pelaksanaan	Anggota

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4	5
18	M. ANDY SYUHADA, S.Kom, MM	III/b	Kasi Monitoring dan Evaluasi	Anggota
19	ANDRI LESMANA, ST	III/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
20	NAIMUL AHMAD RANGKUTI, ST	III/b	Kasi Pendataan	Anggota
21	JONATHAN TOBING, ST		Kasi Pencegahan dan Peningkatan Kwalitas	Anggota
22	YUNI KURNIASIH, ST	III/b	Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian	Anggota
23	ABDUL RAHMAN	III/b	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
24	MOCHAMAD IKHSAN, ST	III/c	Kasubbag Umum	Anggota
25	SAMSUL EFENDI, SE	III/c	Kasubbag Keuangan	Anggota
26	BAHARUDDIN KUDA DIRI	III/b	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
27	DOLSE ROIBOT MANULANG, SE	III/c	Bendahara Penerima	
28	ANTON SITORUS, SE	IIVc	Bendahara Pengeluaran	
29	FITRIA DEWI, ST	III/b	Staf	Sekretaris
30	RISDIANTO, S.Sos	III/a	Staf	Anggota
31	AGUS TIAWAN SETIADI	II/d	Staf	Anggota
32	NARWAN RIYANTO	I/c	Staf	Anggota

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN ROMAN SUMATERA UTARA

Tr. IDA JAMANA, M.Si,
Pernsina Tingkat I
VIII ENSO 125 199203 2 001